



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2011
TANGGAL 02 DESEMBER 2011

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHAN
DI PULAU SULAWESI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANAN DI PULAU SULAWESI

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Pelabuhan Bitung	Pelabuhan Utama	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Bitung untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Andalan Manado dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan industri, Kawasan Andalan Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow) dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan, Kawasan Andalan Laut Bunaken dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Laut Batutoli dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan dan pariwisatab. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Bitung yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, jaringan penyeberangan antarprovinsi dan antarpulau, dan Bandar Udara Sam Ratulangic. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan memanfaatkan ALKI III dari/menjuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan ikan beku, ikan kaleng, udang, kelapa, kacang tanah, minyak atsiri, minyak kelapa, kopi, dan kakaod. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Bitung untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, PKW Tomohon, PKW Tondano, dan PKW Kotamobague. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Bitungf. memanfaatkan bersama Pelabuhan Bitung untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarag. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. memantapkan Pelabuhan Bitung untuk meningkatkan akses PKN Kawasan Perkotaan Manado-Bitung menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulani. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lautj. menetapkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Bitungk. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Pelabuhan Pantoloan	Pelabuhan Utama	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pantoloan untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan, Kawasan Andalan Poso dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan industri, serta Kawasan Andalan Kolonedale dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, agroindustri, dan pertambanganb. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pantoloan yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, dan Bandar Udara Mutiara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan memanfaatkan ALKI II dari/menjuhi Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan kakao, kayu, minyak kelapa, dan meubeld. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pantoloan untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKN Palu, PKW Donggala, PKW Poso, PKW Pasangkayu, dan PKW Kolonedalee. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Pantoloanf. memanfaatkan bersama Pelabuhan Pantoloan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarag. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhanh. memantapkan Pelabuhan Pantoloan untuk meningkatkan akses PKN Palu menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulani. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lautj. menetapkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Pantoloank. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
3.	Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)	Pelabuhan Utama	<p>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Andalan Makassar-Sungguminasa-Takalar-Maros (Mamminasata) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, dan perikanan, Kawasan Andalan Bulukumba-Watampone dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, dan perdagangan, Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata</p> <p>b. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan, jaringan penyeberangan antarpulau, dan Bandar Udara Sultan Hassanuddin</p> <p>c. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan memanfaatkan ALKI II dari/menjuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan peternakan dan olahannya, ikan beku, ikan kaleng, udang, padi, tepung tapioka, sayuran segar, buah-buahan, migas, dan obat-obatan</p> <p>d. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata, PKW Pangkajene, PKW Barru, PKW Pare-pare, PKW Watampone, PKW Jeneponto, dan PKW Bulukumba</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarag. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhanh. memantapkan Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar) untuk meningkatkan akses PKN Kawasan Perkotaan Mamminasata menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulani. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lautj. menetapkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Soekarno-Hatta (Makassar)k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pelabuhan Gorontalo	Pelabuhan Pengumpul	a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Gorontalo untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan perkebunan, Kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Laut Tomini dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Gorontalo yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, jaringan penyeberangan antarprovinsi, dan Bandar Udara Djalaludinc. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan memanfaatkan ALKI III dari/menjuhu Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan jagung, tepung tapioka, pakan ternak, gula, madu, dan kayud. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Gorontalo untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKN Gorontalo, PKW Isimu, PKW Kuandang, dan PKW Talamutae. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Gorontalof. memanfaatkan bersama Pelabuhan Gorontalo untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarag. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhanh. memantapkan Pelabuhan Gorontalo untuk meningkatkan akses PKN Gorontalo menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulani. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lautj. menetapkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Gorontalo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.	Pelabuhan Donggala	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Donggala untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Andalan Palu dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambanganb. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Donggala yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, dan Bandar Udara Mutiarac. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan memanfaatkan ALKI II dari/menuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan kakao, kayu, gula, dan minyak kelapad. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Donggala untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKN Palu dan PKW Donggalae. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Donggalaf. memanfaatkan bersama Pelabuhan Donggala untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarag. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">h. memantapkan Pelabuhan Donggala untuk meningkatkan akses PKN Palu menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulani. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lautj. menetapkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Donggalak. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	Pelabuhan Toli-toli	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Toli-toli untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Andalan Toli-toli dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata, dan pertambanganb. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Toli-toli yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Utara, dan jaringan penyeberangan antarpulauc. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan memanfaatkan ALKI II dari/menjuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan kakao, ikan laut, kayu, dan madu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">d. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Toli-toli untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKW Toli-toli dan PKW Buole. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Toli-tolif. memanfaatkan bersama Pelabuhan Toli-toli untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarag. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhanh. memantapkan Pelabuhan Toli-toli untuk meningkatkan akses PKW Toli-toli menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulani. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lautj. menetapkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Toli-tolik. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7.	Pelabuhan Pare-pare	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pare-pare untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Andalan Pare-pare dan Sekitarnya dengan sektor unggulan agroindustri, pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta Kawasan Andalan Laut Selat Makassar dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pare-pare yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatanc. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan memanfaatkan ALKI II dari/menuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan peternakan dan olahannya, ikan beku, padi, tepung tapioka, sayuran segar, dan buah-buahand. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Pare-pare untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKW Pare-paree. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Pare-paref. memanfaatkan bersama Pelabuhan Pare-pare untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negarag. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhanh. memantapkan Pelabuhan Pare-pare untuk meningkatkan akses PKW Pare-pare menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulani. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi lautj. menetapkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Pare-pare



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8.	Pelabuhan Belang-belang	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Belang-belang untuk meningkatkan pengembangan Kawasan Andalan Mamuju dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, kehutanan, agroindustri, dan perikananb. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Belang-belang yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sulawesi, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Selatan, jaringan penyeberangan antarpulau, dan Bandar Udara Tampa Padangc. mengembangkan kegiatan ekspor-impor antarnegara dan antarpulau dalam jumlah besar dengan memanfaatkan ALKI II dari/menjuju Kawasan Asia Pasifik, dengan komoditas unggulan kakao, ikan beku, kayu, padi, dan minyak kelapad. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Belang-belang untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan nasional, meliputi PKW Mamuju dan PKW Majenee. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Belang-belangf. memanfaatkan bersama Pelabuhan Belang-belang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	NAMA PELABUHAN	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan h. memantapkan Pelabuhan Belang-belang untuk meningkatkan akses PKW Mamuju menuju tujuan-tujuan pemasaran produk unggulan i. menetapkan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut j. menetapkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) untuk menjaga fungsi Pelabuhan Belang-belang k. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai aslinya



SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Reino Purni Budi Astuti